

PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA LAMATTI RIAJA KECAMATA BULUPODDO KABUPATEN SINJAI

Sandi¹, Dafyar Eliadi H², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Corespondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam mendukung pelayanan publik di Desa Lamatti Riaja, Kabupaten Sinjai. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal, yaitu pembinaan KIM yang meliputi aspek pengarahan, motivasi, pengawasan, dan koordinasi, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas pembinaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi terhadap enam informan kunci yang terdiri dari pemerintah desa, pengurus KIM, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan KIM masih menghadapi sejumlah kendala. Aspek pengarahan yang dilakukan pemerintah desa dan Dinas Kominfo lebih banyak bersifat umum sehingga belum memberikan panduan teknis yang jelas. Motivasi anggota KIM juga masih rendah akibat minimnya insentif maupun penghargaan yang diberikan. Pengawasan terhadap kinerja KIM masih sebatas laporan tahunan tanpa adanya monitoring rutin yang berkelanjutan. Sementara itu, koordinasi antar pemangku kepentingan belum berjalan maksimal, yang mengakibatkan keterlambatan arus informasi ke masyarakat. Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat posisi KIM, antara lain adanya regulasi formal berupa Peraturan Bupati Sinjai tentang KIM, dukungan pemerintah desa, serta peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi. Namun demikian, faktor penghambat juga cukup signifikan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia KIM, lemahnya koordinasi, serta minimnya insentif dan penghargaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan KIM dalam mendukung pelayanan publik sangat bergantung pada pembinaan yang terarah, intensif, dan berkesinambungan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemberian motivasi melalui insentif, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, serta koordinasi lintas sektor yang lebih efektif menjadi strategi penting yang perlu diterapkan agar KIM mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Kata Kunci: Pembinaan, KIM, Pelayanan Publik, Pengarahan, Motivasi, Pengawasan, Koordinasi.

Abstract

This study aims to analyze the development of Community Information Groups (KIM) in supporting public services in Lamatti Riaja Village, Sinjai Regency. The research focuses on two aspects: KIM development, which includes aspects of direction, motivation, supervision, and coordination, and the supporting and inhibiting factors that influence the effectiveness of this development. This study used a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, observation, and documentation with six key informants from the village government, KIM administrators, and other relevant parties. The results indicate that KIM development still faces several obstacles. The direction provided by the village government and the Communication and Information Agency is largely general in nature, thus lacking clear technical guidance. Motivation of KIM members is also low due to the lack of incentives and rewards. Supervision of KIM performance is limited to annual reports without ongoing routine monitoring. Meanwhile, coordination between stakeholders has not been optimal, resulting in delays in the flow of information to the public. On the other hand, several supporting factors strengthen KIM's position, including formal regulations in the form of the Sinjai Regent's Regulation on KIM, support from the village government, and opportunities offered by developments in information technology. However, inhibiting factors are also significant, such as low public digital literacy, limited human resource competency within KIM, weak coordination, and minimal incentives and rewards. Therefore, it can be concluded that KIM's success in supporting public services depends heavily on targeted, intensive, and continuous development. Strengthening human resource capacity, providing motivation through incentives, optimizing the use of digital technology, and more effective cross-sector coordination are important strategies that need to be implemented to ensure KIM can optimally carry out its functions.

Keywords: *Development, KIM, Public Services, Direction, Motivation, Supervision, Coordination.*

A. Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Keberhasilan pelayanan publik di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparatur desa, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam proses penyampaian informasi, aspirasi, dan partisipasi aktif. Dalam konteks ini, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) hadir sebagai wadah komunikasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang dibentuk untuk mengelola, menyebarluaskan, serta menyalurkan informasi yang relevan. KIM berfungsi sebagai fasilitator, mitra pemerintah, penyalur aspirasi, pelancar arus informasi, serta terminal informasi bagi masyarakat desa. Keberadaan KIM diharapkan dapat mengoptimalkan arus informasi dua arah, sehingga program-program pembangunan dan pelayanan publik dapat tersampaikan dengan baik, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan riil warga.

Pembinaan KIM di Desa Lamatti Riaja menjadi faktor penting untuk memastikan kelompok ini dapat berfungsi secara optimal. Pembinaan yang dilakukan mencakup peningkatan kapasitas anggota KIM, penguatan jejaring komunikasi, pengelolaan informasi secara efektif, dan pemanfaatan media digital sebagai sarana publikasi. Melalui

pembinaan yang terarah, KIM diharapkan dapat menjadi wahana informasi dan komunikasi yang efektif, agen perubahan sosial, serta sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Teori Pembinaan Menurut Guba Lincoln (1983:193), menyatakan bahwa “pembinaan yang baik itu diperlukan adanya koordinasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan tindakan perencanaan bimbingan dan pengadilan pengawasan. Dengan demikian pembinaan yang baik merupakan usaha pengkoordinasian atau penyatuan dari kegiatan perencanaan bimbingan dan pengawasan, Menurut S. Hidayat (1987:26), dalam Yendralwita mengatakan “pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan subjek didik dan tindakan, pengarahan, bimbingan, pengawasan (aktifitas).

Pelayanan merupakan salah satu unsur terpenting untuk menarik minat dari para calon pelanggan atau member (Akmul et al., 2024). Pelayanan publik adalah segala bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun administrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, layanan publik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesetaraan.

Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya lokal yang cukup besar. Pemerintah desa telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi dan program berbasis teknologi informasi. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan akses informasi di kalangan masyarakat, rendahnya literasi digital, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik. Dalam kondisi demikian, peran KIM menjadi strategis untuk menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Pemerintah juga memerlukan sistem komunikasi yang efektif untuk menampung aspirasi masyarakat. Namun, keragaman kondisi geografis Indonesia masih memunculkan kesenjangan informasi, khususnya di wilayah perbatasan dan terpencil, termasuk Desa Lamatti Riaja. Padahal, informasi merupakan hak fundamental setiap warga negara tanpa terkecuali. Realitanya, tidak semua masyarakat mampu memperoleh informasi secara cepat dan tepat. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya literasi digital serta keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Di tengah era digitalisasi dan keterbukaan informasi saat ini, komunikasi yang efektif menjadi elemen krusial dalam mendukung peningkatan pelayanan publik.

Salah satu inisiatif yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi di masyarakat adalah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). KIM merupakan kelompok sosial yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebarluasan informasi, sekaligus menjadi wadah komunikasi dua arah yang efektif.

Dengan permasalahan tersebut diatas , maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Bagaimana Pembinaan Pengarahan, Motivasi, Pengawasan dan Kordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam mendukung kelancaran pelayanan publik di Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai?

2. Faktor Apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Pembinaan KIM untuk menjalankan peran KIM mendukung Pelayanan Publik?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari penelitian yang bersifat deskriptif dan proses yang lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi resmi. Dengan informan yang diwawancarai sebanyak 6 orang informan, Lokasi penelitian dilakukan di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Dan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, mulai dari bulan Maret hingga Juni 2025

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembinaan Pengarahan, Motivasi, Pengawasan dan Kordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam mendukung kelancaran pelayanan public. Berdasarkan hasil wawancara Bersama informan mengatakan bahwa pengarahan dilakukan dengan cara santai sehingga anggota bisa lebih mudah menerima arahan. Pendekatan informal yang digunakan membuat komunikasi lebih cair. Anggota KIM merasa lebih bebas bertanya dan berdiskusi, sehingga pengarahan dapat diterima dengan cepat tanpa menimbulkan kesan kaku. Dengan pola pengarahan seperti ini, anggota dapat langsung menghubungkan arahan dengan situasi nyata. Hal tersebut mempercepat pemahaman karena arahan tidak hanya berupa teori, melainkan langsung terkait dengan praktik di lapangan.

Motivasi juga muncul dari dukungan pimpinan maupun sesama anggota. Dan menekankan bahwa motivasi diberikan melalui komunikasi hangat. Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan lewat diskusi bersama. Diskusi bersama membuat suasana lebih akrab dan tidak ada jarak antara pengurus dan anggota. Selain itu, koordinasi juga banyak dilakukan dengan komunikasi digital. Forum desa meningkatkan transparansi dan partisipasi semua pihak dalam kegiatan. Grup pesan singkat menjadi sarana komunikasi yang cepat dan praktis. Forum desa memberikan ruang partisipasi luas bagi semua pihak. Rapat rutin mempercepat penyebaran informasi sehingga meminimalisir kesalahpahaman.

Sejalan dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2018, pembinaan KIM ini mendukung lima peran utama yang harus dijalankan. Pertama, sebagai fasilitator bagi masyarakat, KIM menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah desa sehingga informasi pelayanan publik dapat diterima dengan mudah dan jelas. Kedua, sebagai mitra pemerintah desa, KIM mendukung pelaksanaan program pembangunan dan penyebaran informasi yang akurat, sehingga sinergi antara pemerintah dan masyarakat lebih terjaga. Ketiga, sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, KIM menampung kebutuhan dan harapan warga untuk kemudian disampaikan ke pihak terkait, sehingga kebijakan desa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, sebagai pelancar arus informasi, KIM memastikan informasi desa dapat diakses secara merata, tepat waktu, dan melalui berbagai media, meningkatkan literasi masyarakat dan mempermudah akses

layanan publik. Kelima, sebagai terminal informasi masyarakat, KIM menjadi pusat rujukan bagi warga untuk layanan administrasi, program desa, dan kegiatan publik, sehingga meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain itu, sesuai Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2018, pembinaan KIM terkait dengan lima peran utama yang harus dijalankan, yaitu: a). Fasilitator bagi masyarakat – KIM bertindak sebagai penghubung antara warga dan pemerintah desa, membantu masyarakat memperoleh informasi terkait pelayanan publik dengan cara yang mudah dipahami. Dengan pengarahan yang jelas dan koordinasi yang baik, anggota KIM dapat menjembatani komunikasi secara efektif, memastikan warga mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta mengurangi kesalahpahaman yang mungkin terjadi; c). Mitra pemerintah desa – KIM mendukung pelaksanaan program pembangunan dan penyebaran informasi yang akurat. Melalui motivasi dan pengawasan yang konsisten, anggota KIM dapat bekerja profesional dan bertanggung jawab, memastikan setiap informasi yang disampaikan sesuai dengan kebijakan dan prioritas desa. Peran ini memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga program pembangunan lebih tepat sasaran; d). Penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat – KIM berfungsi menampung kebutuhan, harapan, dan aspirasi warga, kemudian menyampaikannya kepada pihak terkait. Dengan koordinasi yang efektif, aspirasi ini tidak hanya diteruskan secara tepat waktu, tetapi juga dianalisis untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian, masyarakat merasa didengar dan dilibatkan dalam proses pembangunan desa; e). Pelancar arus informasi – KIM memastikan seluruh informasi desa dapat diakses masyarakat secara merata dan tepat waktu. Dengan dukungan pelatihan dan motivasi yang memadai, anggota KIM dapat memanfaatkan berbagai media, baik cetak maupun digital, untuk menyebarkan informasi secara cepat dan akurat. Peran ini membantu meningkatkan literasi masyarakat, mempermudah akses layanan publik, dan mengurangi kesenjangan informasi antarwarga; d). Terminal informasi masyarakat – KIM berfungsi sebagai pusat informasi yang dapat dijadikan rujukan warga untuk layanan administrasi, program desa, dan kegiatan publik lainnya. Dengan pengarahan yang sistematis dan pengawasan yang berkesinambungan, terminal informasi ini menjadi sumber terpercaya, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dengan pembinaan yang efektif pada keempat indikator tersebut, KIM di Desa Lamatti Riaja mampu menjalankan lima peran ini secara optimal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, membangun rasa saling percaya, serta mendorong budaya komunikasi yang terbuka dan responsif. KIM tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif, mendorong inovasi dalam penyebaran informasi, dan penggerak pembangunan desa yang berkelanjutan. Pembinaan yang terstruktur ini menjadikan KIM profesional, responsif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dalam berbagai aspek kehidupan, baik administratif maupun sosial.

Secara keseluruhan, pembinaan KIM melalui pengarahan, motivasi, pengawasan, dan koordinasi membentuk organisasi yang profesional, responsif, dan bermanfaat bagi

masyarakat desa. Keempat aspek tersebut saling mendukung satu sama lain sehingga KIM dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, mempercepat arus informasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pembinaan KIM untuk menjalankan peran KIM mendukung Pelayanan Publik. Dukungan regulasi dan kebijakan menjadi salah satu faktor pendukung yang penting. Hal ini memberi dasar hukum bagi KIM untuk bergerak. Ditambah dengan partisipasi masyarakat, kegiatan KIM semakin terasa manfaatnya (Wawancara pada tanggal 17 Juni 2025). Adanya regulasi memberi dasar hukum yang jelas, sedangkan partisipasi masyarakat membuat kegiatan KIM semakin kuat dan bermanfaat. Kepala Desa Lamatti Riaja) menyebutkan bahwa gotong royong masyarakat menjadi faktor utama. Semangat gotong royong masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung utama. Kerja sama ini membuat setiap kegiatan lebih ringan. Selain itu, adanya komunikasi yang baik dengan pemerintah semakin memperkuat pembinaan (Wawancara Pada Tanggal 19 Juni 2025).

Regulasi dan Dasar Hukum KIM memiliki legitimasi formal melalui Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2018. Regulasi ini mempertegas peran KIM sebagai lembaga mitra pemerintah desa dalam penyebaran informasi publik. Keberadaan dasar hukum ini menjadi landasan penting dalam pembinaan KIM Dukungan Pemerintah Desa Pemerintah desa memberikan dukungan moral dan material, seperti penyediaan akses internet, perangkat komputer, papan informasi, serta fasilitas ruang pertemuan. Dukungan ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah desa dalam memperkuat KIM sebagai bagian dari sistem pelayanan publik. Modal Sosial Masyarakat Partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan KIM merupakan modal sosial penting. Antusiasme warga dalam mengikuti sosialisasi, mengakses informasi, serta memberikan masukan memperkuat legitimasi KIM sebagai lembaga berbasis komunitas. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi publik juga menjadi faktor pendukung tambahan. Warga yang terbiasa mencari dan memanfaatkan informasi melalui KIM akan lebih mudah menerima program- program desa, meningkatkan transparansi, dan memperkuat partisipasi dalam Pembangunan lokal.

Adapun factor penghambat dalam Pembinaan KIM untuk menjalankan peran KIM mendukung Pelayanan Publik, Dr. Mansyur, S.Pd., M.Si (Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Sinjai) (Kepala Dinas Kominfo) menyoroti keterbatasan fasilitas sebagai hambatan utama.

Keterbatasan fasilitas, khususnya sarana komunikasi dan dokumentasi, menghambat efektivitas kegiatan KIM. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memegang peran penting sebagai fasilitator informasi sekaligus pendukung pelayanan publik di tingkat desa. Keberadaan KIM sangat dibutuhkan dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa, khususnya dalam menyampaikan informasi-informasi terkait layanan administrasi, program bantuan, kegiatan sosial, serta kebijakan desa.

KIM membantu menciptakan arus informasi dua arah yang efektif baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Dalam konteks pemerintahan berbasis teknologi, KIM berperan sebagai penghubung utama yang mengedukasi masyarakat desa yang belum memiliki kemampuan memadai untuk memahami dan

mengakses informasi digital. Ini sangat penting mengingat masih adanya keterbatasan literasi digital, faktor sosial-ekonomi, serta hambatan kultural di masyarakat. Selain itu, kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai Mitra pemerintah sedikit menjalankan perannya tersebut dengan membantu pekerjaan pemerintah desa terkait dengan pendataan berbasis elektronik, atau *E-Government*, karena Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini di upayakan mampu mendorong atau mendukung Desa Lamatti Riaja untuk mendukung pelayanan Publik.

Sebagai Mitra Dialog dengan Pemerintah Desa Lamatti Riaja dalam merumuskan Kebijakan Publik, KIM yang mengetahui kebutuhan publik dan karakteristiknya, Pemerintah desa lamatti Riaja dalam merumuskan kebijakan publik dapat menjadikan KIM sebagai mitra dialog. Selain itu KIM dapat mendukung pelaksanaan semua kebijakan publik dan memonitoring pelaksanaannya.

KIM berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat, khususnya terkait keluhan atau saran terhadap pelayanan publik. Aspirasi biasanya disampaikan warga secara langsung kepada pengurus KIM atau melalui media sosial resmi. Selanjutnya, aspirasi tersebut diteruskan kepada pemerintah desa untuk dibahas dalam forum musyawarah desa. Meskipun demikian, efektivitas penyerapan aspirasi masih terbatas. Beberapa warga menilai bahwa proses penyampaian aspirasi melalui KIM belum selalu menghasilkan tindak lanjut yang cepat. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme umpan balik agar aspirasi yang masuk dapat segera direspons oleh pihak terkait. Teori partisipasi masyarakat menekankan bahwa komunikasi dua arah menjadi kunci keberhasilan KIM dalam fungsi ini. Kelompok informasi masyarakat di Desa lamatti Riaja diupayakan mampu menyerap dan sekaligus menjadi aspirasi bagi masyarakat dalam menjalankan perannya. Maka dibutuhkan Kerjasama dari semua pihak yang mendukung atau membantu agar peran ini berjalan.

Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Lamatti Riaja dalam mendukung kelancaran pelayanan publik dilakukan melalui empat indikator utama, yaitu pengarahan, motivasi, pengawasan, dan koordinasi. Pengarahan bertujuan memberikan petunjuk, instruksi, dan bimbingan yang jelas kepada anggota KIM agar memahami peran, tugas, dan prosedur kerja dalam penyebaran informasi publik. Motivasi diperlukan untuk meningkatkan semangat dan dedikasi anggota melalui penghargaan, pelatihan, serta pengakuan dari pemerintah desa dan masyarakat. Pengawasan memastikan kegiatan KIM berjalan sesuai standar dan tujuan pembinaan melalui monitoring, evaluasi, dan pemberian feedback, sedangkan koordinasi menyatukan upaya anggota KIM, pemerintah desa, dan instansi terkait sehingga arus informasi dapat tersampaikan secara cepat, tepat, dan merata.

Sejalan dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2018, pembinaan KIM ini mendukung lima peran utama yang harus dijalankan, yaitu: sebagai fasilitator bagi masyarakat yang menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah desa; sebagai mitra pemerintah desa yang mendukung pelaksanaan program pembangunan dan penyebaran informasi yang akurat; sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat yang menampung kebutuhan warga untuk disampaikan kepada pihak terkait; sebagai pelancar arus informasi yang memastikan informasi desa dapat diakses secara merata dan

tepat waktu; serta sebagai terminal informasi masyarakat yang menjadi pusat rujukan bagi warga terkait layanan administrasi, program desa, dan kegiatan publik.

Keberhasilan pembinaan KIM dalam menjalankan lima peran ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain regulasi yang memberikan dasar hukum, dukungan aktif pemerintah desa dan Dinas Kominfo, pemanfaatan teknologi digital, motivasi dan penghargaan terhadap anggota, serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mengakses dan menyalurkan informasi. Namun, pembinaan KIM juga menghadapi kendala atau penghambat yang perlu diperhatikan. Pengarahan yang masih bersifat umum menyebabkan target kerja kurang jelas, sementara motivasi anggota menurun karena minimnya insentif, penghargaan, dan kesempatan pelatihan. Pengawasan yang terbatas hanya pada laporan tahunan mengurangi kontrol terhadap kualitas informasi, dan koordinasi yang tidak optimal menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi. Selain itu, keterbatasan sarana, anggaran, atau perangkat teknologi menjadi hambatan signifikan dalam menjalankan peran sebagai pelancar arus informasi dan terminal informasi masyarakat, sehingga berdampak pada efektivitas KIM dalam mendukung pelayanan publik.

Dengan pembinaan yang terstruktur dan didukung faktor-faktor pendukung, serta upaya mengatasi hambatan yang ada, KIM di Desa Lamatti Riaja mampu menjalankan lima perannya sesuai Peraturan Bupati Sinjai secara optimal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah desa, tetapi juga menjadikan KIM sebagai agen perubahan yang profesional, responsif, dan mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa secara berkelanjutan.

D. Kesimpulan

1. Komunikasi Pembinaan KIM melalui pengarahan, motivasi, pengawasan, dan koordinasi berjalan secara bertahap dan saling mendukung. Pengarahan memberikan pemahaman yang jelas mengenai tugas dan peran anggota KIM, motivasi meningkatkan semangat dan dedikasi anggota, pengawasan memastikan ketaatan dan profesionalisme, sementara koordinasi menjamin keterpaduan kerja antaranggota KIM dan dengan pemerintah desa. Kombinasi keempat aspek ini membuat KIM dapat menjalankan fungsinya sebagai fasilitator informasi publik dengan lebih efektif.
2. Faktor pendukung dan penghambat KIM menunjukkan bahwa keberhasilan KIM dipengaruhi oleh legitimasi formal, dukungan pemerintah desa, potensi teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat. Namun, hambatan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan SDM, minimnya insentif, lemahnya koordinasi, kurangnya pengawasan, serta faktor sosial-budaya dapat mengurangi efektivitas KIM. Faktor pendukung ini dapat dimanfaatkan sebagai modal utama, sedangkan faktor penghambat perlu diatasi melalui strategi pengembangan yang tepat. Secara keseluruhan, KIM Desa Lamatti Riaja memiliki potensi besar untuk menjadi pusat informasi yang profesional, transparan, dan partisipatif, asalkan pembinaan yang berkesinambungan dan strategi pengembangan yang komprehensif diterapkan.

Referensi

Buku

- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *Teori Pembinaan*.
- Hardiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba.
- Muluk, M. R. K. (2020). *Inovasi dalam Paradigma Administrasi Publik*. *Pustaka.Ut.Ac.Id*, 1-47. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfrm/DAPU6105-M1.pdf>
- Nanda, R. (2018). *Evaluasi Dampak Program Kelompok Informasi*. *Repository.Ub.Ac.Id*.
- Sihotang. (2017). *Old Public Administration, New Public Management*,. 10-43.

Jurnal

- Alamsyah Anggriani. (2016). Perkembangan Paradigma Administras Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 04(2), 1-28.
- Alfando, J. (2013). Peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Sidomulyo Kec . Anggana Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 109-125. ejournal.ilkom.co.id
- Amiruddin Marsuki Ali. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mendukung E-Government Di Desa Tongke- Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 10 (1), 23-31.
- Dedek Kusnadi. (2023). Implementasi Pelayanan Publik Di Dinas Pariwisata Di Kota Jambi. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 263-279. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v2i2.2596>
- Fachruddin, A. (2019). Pengertian Pembinaan Menurut Ahli. *Journal*, 11-31. Fathurrohkim, Aldi, Djaelani, K., Abdul, & Wahono, B. (2022). Pengaruh Pembinaan, Kompetensi, dan pelatihan terhadap Kinerja Pemain Sepak Bola. *Jurnal Riset Manajemen*, 11(24), 57-63. www.fe.unisma.ac.id
- Fauzan, H. S. (2018). Filsafat ilmu administrasi sebagai hakikat dan makna dalam keilmuan administrasi publik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/view/272%0Ahttps://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/download/272/248>
- Fayol, Henri. (Tanpa Tahun). GagasanKontribusi, Dan Batasannya. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 6(2), 44-66. <https://doi.org/10.20414/politea.v6i2.8544>
- Humanika Makkarana, A., Cangara, H., & Ali, S. A. (2017). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Sebagai Saluran Berbagi Informasi Penangkapan Telur Ikan Terbang Di Kabupaten Majene Dan Polman. *KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 294. <https://doi.org/10.31947/kjik.v6i2.5330>
- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 17-18. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>
- Muhtadi, T. Y., & Erialdy. (2021). Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Dalam Memandu Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 342-348.

- Mukti, A., & Winanta, R. A. (2021). Kelompok Informasi Masyarakat Dan Masyarakat Informasi (Studi Kasus Kontribusi Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi di Kota Magelang): Community Information Groups And The Information Society (Case Study of the Contribution. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 1-10.
- Noora Fithriana, Sesilia Kerong Blolon, F. F. (2013). Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699. <http://arxiv.org/abs/1011.1669v0><http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Redminto dan Minarsih. (2016). Manajemen pelayanan publik. Pengaruh Manajemen Pelayanan Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Enrekang, 2(1), 291-304.
- Riska Indramaya Sinaga, Linawati, A. S. (2024). Peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Kota Tangerang (Studi Kasus Program Usaha Mikro Kecil Menengah di Kampung Kuliner Pada Tahun 2022). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (8), 863-891, 24(7), 28-42.
- Sandi, Amiruddin, J. (2020). Implementasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sebagai Pendukung Terwujudnya E-Government di Desa Lamatti Riaja. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(3), 229-237.
- Sari, V. B. (2024). Peran kelompok informasi masyarakat (kim) tirta gumitir sebagai sumber informasi dan pemberitaan di desa sidomulyo kecamatan silo kabupaten jember (Issue November).
- Septaning Rena Julika, I. I. P. (2016). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mendorong Pembangunan Desa. *Public Corner*, 11(2), 1-16.
- Sunuantari, M., Bajari, A., Damayani, N. A., & Hubeis, M. (2015). Membangun Masyarakat Informasi Berbasis Kelompok. *Wacana*, XIV(4), 355-371.
- Yasintha, P. N. (2021). Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) Sebagai Model Partisipasi Publik Dalam Keterbukaan Informasi Di Tingkat Desa Di Bali. *Jipka*, 1(1), 2021.

Perundang-Undangan

- Akmul, A., Sumarno, S., Darmawan, D., & Supriadi, A. (2024). Strategi Pengembangan Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Transparansi Penyaluran Bantuan di Kabupaten Wajo Universitas Puangrimaggalatung, Indonesia Mengacu pada pengesahan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik Tahun bantuan sosial di Indonesi. 1(3).